

ABSTRAK

Kawasan Perkotaan Padalarang baru dapat menangani sekitar 56 % dari total timbunan sampah, berarti ada sekitar 44% sampah yang tidak tertangani atau dikelola sendiri oleh masyarakat, berserakan di jalan dan terbuang ke sungai. Tentunya akan mengakibatkan dampak dan tekanan pada kondisi lingkungan. Perlu dicari alternatif pengelolaan persampahan secara berkelanjutan. Pengelolaan persampahan berkelanjutan artinya adalah dilaksanakan berdasarkan kemampuan sumber daya yang dimiliki, dapat mempertahankan kondisi fisik lingkungan, berorientasi untuk mampu berkompetisi dan dapat diwariskan untuk generasi masa depan. Masyarakat adalah sumber daya terbesar yang dimiliki oleh Kota.

Tujuan penelitian ini adalah mencari bentuk pengelolaan persampahan berkelanjutan berdasarkan peran serta masyarakat. Dengan metodologi penelitian menggunakan pendekatan deskriptif komparatif. Untuk analisis digunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui observasi, kuisioner, dan wawancara. Teknik sampling yang digunakan adalah metode *Stratified Random Sampling* dengan jumlah sampel 100 responden yang didapatkan dari rumus Slovin.

Melalui identifikasi yang dilakukan, dihasilkan bahwa preferensi masyarakat terhadap pengelolaan persampahan termasuk dalam kategori baik. Peran serta masyarakat dalam sistem pengelolaan persampahan saat ini masih rendah. Peran *stakeholder* dalam pengelolaan persampahan masih hanya bersifat *normatif*. Potensi dan kendala peran serta masyarakat dapat dikembangkan menjadi bentuk pengelolaan skala rumah tangga, bentuk pengelolaan secara komunal, dan bentuk pengelolaan secara terpusat.

Analisis yang dilakukan menyimpulkan bahwa bentuk pengelolaan yang tepat untuk Kawasan Perkotaan Padalarang adalah "Bentuk Pengelolaan Persampahan Secara Terpusat, melalui pengembangan peran serta masyarakat secara optimal dengan pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan peraturan dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sejak dari sumber sampah serta pelibatan dalam pengolahan akhir sampah. Selain itu membuat suatu analisis perencanaan pengelolaan sampah dengan mengeluarkan suatu skala prioritas untuk pengelolaan sampah di masa datang.

Untuk mendorong agar bentuk pengelolaan ini dapat menjadi "kebutuhan" bagi seluruh *stakeholder*, dibutuhkan adanya hukum yang mengatur mengenai aturan main serta hak dan kewajiban, termasuk implikasi dari penyelenggaraan kerjasama (mitra kerja).

Kata kunci : penanganan sampah, pengelolaan sampah berkelanjutan, peran serta masyarakat, pelibatan dalam pengolahan akhir sampah.